

Judul : DPD Golkar Sulut Sesalkan Tindakan Aditya : KPK Lakukan Penggeladahan di Jakarta dan Manado
Tanggal : Senin, 09 Oktober 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 8

DPD Golkar Sulut Sesalkan Tindakan Aditya KPK Lakukan Penggeledahan di Jakarta dan Manado

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan di Jakarta dan Manado terkait kasus suap yang melibatkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sulut) Sudiwardono dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha. Penyidik menyita sejumlah barang bukti, termasuk CCTV dan bukti pesan hotel di Pacenongan, Jakarta Pusat tempat indikasi suap.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait putusan banding perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulut tahun 2010, Sabtu (7/10). Penetapan dilakukan KPK setelah memeriksa intensif Sudiwardono dan Aditya yang dibekuk tim Satgas dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (6/10) malam.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (9/10), mengatakan, di Jakarta tim penyidik mengeledah rumah dinas Aditya di kompleks DPR RI Kalibata,

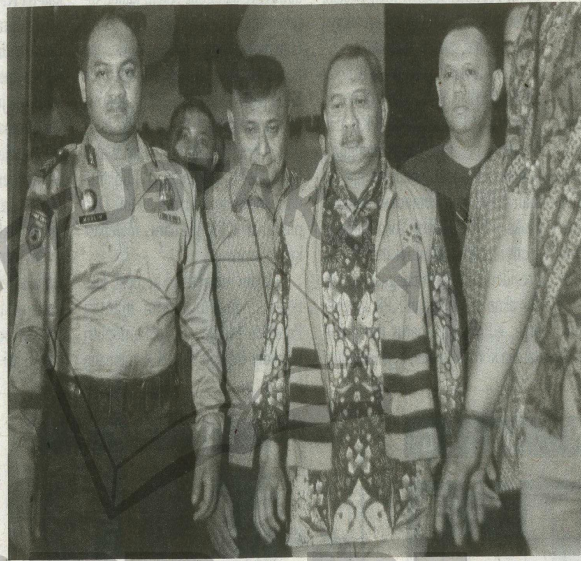
Jakarta Selatan. Sementara di Manado, dua tim mengeledah secara bersamaan di kantor PT Sulut dan rumah dinas Ketua PT Sulut Sudiwardono.

Sejumlah barang bukti yang disita seperti Dari tiga lokasi tersebut penyidik menyita barang bukti elektronik dan dokumen. "Selain itu juga dilakukan penyitaan CCTV dan bukti pesan hotel di lokasi indikasi suap terjadi, yakni di daerah Pecenongan Jakarta Pusat," ungkap Febri.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, Aditya diduga menyuap Sudiwardono dengan nilai kesepakatan SGS 100.000. Diduga suap ini diberikan Aditya kepada Sudiwardono untuk memuluskan penanganan putusan perkara korupsi di tingkat banding dengan terdakwa mantan Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan, yang juga Ibunda Aditya.

"Serta agar penahanan terhadap terdakwa tidak dilakukan," kata Laode.

Uang dugaan suap Rp 1 miliar itu diberikan Aditya



Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono (tengah) berjalan keluar menggunakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (8/10) dini hari.

ke Sudiwardono dalam beberapa tahap. Pemberian awal pada pertengahan Agustus 2017 dengan nilai total sekira SS 60.000 di Manado. Kemudian, pemberian kedua SS 30.000 di sebuah hotel di Jakarta, Jumat (6/10) malam. Transaksi suap kedua terendus tim Satgas KPK yang langsung membekuk Sudiwardono dan Aditya serta tiga orang lain-

nya. Satgas juga menyita uang SS 11.000 di mobil Aditya yang diduga bagian dari total komitmen fee keseluruhan.

Pembinaan Hakim

Sementara itu, Ketua Umum DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Sutrisno menilai, penangkapan terhadap Sudiwardono harus bisa di-

ambil hikmahnya oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Seharusnya dari beberapa kejadian penangkapan yang dilakukan KPK terhadap hakim dan panitera pengadilan, ini menunjukkan Ketua Mahkamah Agung lemah dalam memberikan pembinaan terhadap jajaran di bawahnya.

Ikadin sebagai organisasi profesi advokat mem-

punyai kepentingan terhadap lembaga peradilan yang bersih. Sehingga, setiap advokat ketika menjalankan tugas profesinya dalam litigasi tidak lagi dibayangi praktik suap yang melibatkan panitera dan hakim di semua tingkat peradilan.

Menurut dia, kalau Gayus Lumbun sebagai hakim agung mengetahui apa yang terjadi di MA, maka sudah seharusnya pendapat Gayus didukung sepenuhnya, karena sikap itu merupakan upaya agar MA sebagai benteng terakhir peradilan harus benar-benar bersih.

Pada kesempatan terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara Hamka Kadi menyayangkan tindakan penangkapan salah satu kader Partai Golkar yang juga Anggota DPRD Partai Golkar karena kasus dugaan suap.

"Sungguh suatu duka yang mendalam. Tapi kejadian ini jaghan membuat kita hanyut. Mari kita bangkit dan memperbaiki. Semoga dia tawakal menjalani proses hukum," kata Hamka. [144/F-5]